

## FRAMING MEDIA TERHADAP DEMONSTRASI MAHASISWA: STUDI KASUS PEMBERITAAN AKSI TOLAK RUU TNI

Winda Kustiawan<sup>1</sup>, Rindra Hauzan Fadhali Siregar<sup>2</sup>, Maulida Azmi<sup>3</sup>  
[windakustiawan@uinsu.ac.id](mailto:windakustiawan@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [ozanfadhali1188@gmail.com](mailto:ozanfadhali1188@gmail.com)<sup>2</sup>, [maulidaazmi6@gmail.com](mailto:maulidaazmi6@gmail.com)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media massa membingkai (framing) aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Dalam konteks sistem demokrasi, media berperan penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu sosial dan politik, termasuk penolakan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing dari Robert N. Entman, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola framing yang digunakan oleh media dalam menyusun narasi pemberitaan terkait aksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang lebih mendukung pemerintah cenderung menggambarkan aksi mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan nasional, sementara media yang lebih kritis menekankan pada kekhawatiran mengenai perluasan peran militer dalam kehidupan sipil dan dampaknya terhadap demokrasi. Perbedaan ini memengaruhi cara publik memaknai gerakan mahasiswa serta posisi mereka dalam sistem demokrasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran media independen dalam menjaga transparansi, akuntabilitas kekuasaan, serta memfasilitasi ruang untuk diskursus publik yang sehat, yang merupakan pilar utama dalam keberlangsungan demokrasi.

**Kata Kunci:** Framing, Demokrasi, Media, RUU TNI.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how mass media frames the student protests against the proposed Indonesian National Military Bill (RUU TNI). In the context of a democratic system, media plays a crucial role in shaping public perception of social and political issues, including student opposition to government policies. Using a qualitative approach and Robert N. Entman's framing analysis model, this research identifies the framing patterns employed by the media in constructing narratives around these protests. The findings show that media outlets supportive of the government tend to depict the student protests as a threat to national stability and security, while more critical media highlight concerns over the growing role of the military in civilian life and its implications for democracy. These differences in framing influence how the public perceives the student movement and their role within the democratic system. This study underscores the importance of independent media in ensuring transparency, holding power accountable, and providing a space for healthy public discourse, which are fundamental pillars of a thriving democracy.*

**Keywords:** Framing, Democracy, Media, RUU TNI.

### PENDAHULUAN

Media massa memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap berbagai peristiwa sosial dan politik, termasuk aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Dalam konteks sistem demokrasi modern, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi semata, tetapi juga memainkan peran yang lebih dalam sebagai agen konstruksi realitas sosial melalui proses yang dikenal sebagai pembedingkaian atau framing. Proses framing ini merujuk pada bagaimana media memilih, menyoroti, dan menyusun elemen-elemen informasi tertentu secara selektif untuk membentuk makna atau interpretasi tertentu di benak audiens. Dengan kata lain, media tidak

sekadar melaporkan fakta, tetapi juga membentuk narasi dan kerangka berpikir publik terhadap suatu isu. Fenomena ini menjadi semakin penting dan relevan ketika media memberitakan isu-isu yang bersifat sensitif dan kontroversial, seperti aksi penolakan mahasiswa terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Isu ini bukan hanya menyangkut dinamika politik praktis, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni relasi antara kekuasaan sipil dan kekuatan militer. Dalam konteks tersebut, media berperan dalam menentukan apakah isu tersebut dipahami sebagai bentuk kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, atau justru direduksi sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas nasional.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bagaimana media menerapkan teknik framing dalam melaporkan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa. Eriyanto berpendapat, misalnya, menguraikan dengan cukup rinci tentang bagaimana media menggunakan struktur dan perangkat framing tertentu untuk membentuk pemahaman publik terhadap realitas politik yang sedang berlangsung. Sementara itu, Sobur menekankan pentingnya pilihan bahasa, penggunaan sumber kutipan, serta penyusunan struktur naratif dalam pemberitaan yang dapat memuat bias ideologis tertentu. Penelitian-penelitian ini memperlihatkan bahwa pemberitaan media tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepentingan politik, afiliasi ekonomi, dan posisi ideologis media itu sendiri. Lebih lanjut, studi oleh Wulandari (2020) mengungkap bahwa media kerap memposisikan mahasiswa dalam citra yang ambivalen: di satu sisi mereka dipuji sebagai agen perubahan sosial yang progresif, namun di sisi lain mereka juga dapat digambarkan sebagai aktor yang mengganggu ketertiban dan stabilitas negara. Representasi ini sangat bergantung pada bagaimana media melakukan seleksi terhadap fakta, narasumber, dan kerangka narasi yang digunakan dalam berita.

Hingga saat ini masih sangat terbatas jumlah studi yang secara spesifik membahas bagaimana framing media terhadap aksi mahasiswa yang menolak RUU TNI dilakukan. Padahal, isu ini memiliki dimensi yang sangat krusial karena menyangkut potensi perluasan peran militer dalam kehidupan sipil, yang pada gilirannya dapat berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil di Indonesia. Ketiadaan kajian mendalam mengenai isu ini menunjukkan adanya kekosongan literatur yang perlu segera diisi melalui penelitian yang komprehensif dan kritis. Penelitian semacam ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika gerakan mahasiswa secara substansial, tetapi juga untuk menilai bagaimana media mengonstruksikan narasi tentang aksi tersebut kepada publik. Dengan demikian, analisis framing menjadi alat yang sangat penting dalam mengungkap posisi media—apakah mereka bertindak sebagai pengawal demokrasi, corong kekuasaan, atau sebagai aktor yang berupaya menjaga keseimbangan informasi.

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, karena dapat mengungkap bagaimana media membingkai aksi penolakan terhadap RUU TNI apakah media menunjukkan kecenderungan untuk bersikap netral, mendukung kebijakan pemerintah, atau justru menampilkan sikap kritis terhadap kekuasaan. Analisis ini tidak hanya berguna untuk memperkaya wacana dalam bidang studi komunikasi dan media, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks tersebut, framing media terhadap isu-isu strategis seperti perluasan peran militer dalam ranah sipil dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana media menjalankan fungsi kontrol sosial, menjaga transparansi, dan membela kepentingan publik. Hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi antara media, kekuasaan, dan gerakan sosial, serta memperkuat peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi yang sehat dan partisipatif.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana media massa membingkai (framing) aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi framing yang digunakan oleh media dalam menyusun narasi pemberitaan terkait aksi tersebut, serta menilai kecenderungan posisi media, apakah bersifat netral, mendukung kebijakan pemerintah, atau menunjukkan sikap kritis terhadap kekuasaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap gerakan mahasiswa serta isu yang diangkat, khususnya yang berkaitan dengan potensi perluasan peran militer dalam kehidupan sipil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik dan media, serta memperkaya pemahaman mengenai peran media dalam menjaga kualitas demokrasi, kebebasan sipil, dan akuntabilitas kekuasaan di Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana media massa membingkai pemberitaan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU TNI. Teknik analisis yang digunakan mengacu pada model framing dari Robert N. Entman, yang mencakup empat elemen utama: pendefinisian masalah (problem definition), diagnosis penyebab (causal interpretation), penilaian moral (moral evaluation), dan penyampaian solusi (treatment recommendation).

Data dikumpulkan melalui dokumentasi berita dari beberapa media daring nasional yang memiliki jangkauan luas dan afiliasi politik yang beragam. Pemilihan sampel berita dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, waktu publikasi (berita yang terbit selama periode aksi penolakan RUU TNI berlangsung), serta intensitas peliputan. Selanjutnya, data dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola framing yang muncul dan memahami posisi ideologis media dalam menyampaikan narasi mengenai isu tersebut.

Metode ini dipilih karena mampu mengungkap bagaimana media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara pandang publik terhadap peristiwa sosial-politik tertentu melalui pemilihan kata, struktur berita, dan sudut pandang narasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Framing Media terhadap Aksi Penolakan RUU TNI oleh Mahasiswa**

Media massa memiliki pendekatan yang berbeda dalam membingkai aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU TNI. Media yang cenderung mendukung pemerintah lebih menyoroti aksi mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan keamanan publik. Dalam framing ini, pemberitaan sering kali menggambarkan mahasiswa sebagai kelompok yang terprovokasi atau tidak memahami sepenuhnya implikasi dari tindakan mereka. Misalnya, istilah seperti "kerusuhan" atau "anarkisme" digunakan untuk menggambarkan aksi tersebut, yang memberikan kesan bahwa aksi mahasiswa mengganggu proses demokrasi atau menciptakan ketegangan yang tidak perlu dalam masyarakat. Media

jenis ini berfokus pada dampak sosial negatif dari demonstrasi, seperti gangguan lalu lintas atau kerusuhan, yang lebih sering dibahas daripada substansi kritik terhadap RUU TNI itu sendiri.

Media yang lebih kritis terhadap pemerintah atau yang lebih independen cenderung mengangkat isu-isu substansial di balik penolakan RUU TNI. Framing yang digunakan menekankan pada kekhawatiran akan meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Media ini lebih banyak memberi ruang bagi suara mahasiswa, akademisi, dan tokoh masyarakat yang mengkritik RUU TNI dengan argumen yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dalam pemberitaan ini, mahasiswa tidak hanya digambarkan sebagai kelompok yang bereaksi emosional terhadap kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan demikian, framing media terhadap aksi mahasiswa tidak hanya menciptakan gambaran tentang siapa yang benar atau salah, tetapi juga memengaruhi bagaimana publik memaknai tujuan dan legitimasi dari gerakan penolakan tersebut.

### **Representasi Mahasiswa dalam Pemberitaan Media**

Representasi mahasiswa dalam pemberitaan media sangat dipengaruhi oleh ideologi dan orientasi politik masing-masing media. Pada media yang lebih mendukung pemerintah atau yang berafiliasi dengan kekuasaan, mahasiswa sering kali digambarkan dalam citra negatif, misalnya sebagai kelompok yang mudah diprovokasi, kurang rasional, atau bahkan dianggap sebagai pihak yang bertujuan untuk mengganggu ketertiban sosial.<sup>1</sup> Dalam pemberitaan semacam ini, mahasiswa sering diberi ruang yang terbatas, dengan fokus pada kekacauan atau ketegangan yang timbul selama aksi, bukan pada alasan atau substansi yang mendasari demonstrasi tersebut. Pilihan narasumber juga sangat menentukan, di mana media cenderung mengutip pihak-pihak yang memandang aksi mahasiswa sebagai gangguan, seperti aparat keamanan atau pejabat pemerintah.

Media yang lebih independen atau yang kritis terhadap pemerintah memiliki kecenderungan untuk menggambarkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang penting dalam demokrasi. Dalam *framing* ini, mahasiswa diberi representasi yang lebih positif sebagai kelompok yang berani menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Berbagai kutipan dari mahasiswa, tokoh masyarakat, dan ahli hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap RUU TNI bukanlah sekadar bentuk protes emosional, tetapi sebuah upaya menjaga prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum. Pemberitaan yang lebih mendalam ini membantu menciptakan citra mahasiswa sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. *Framing* ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap aksi mahasiswa, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan.<sup>2</sup>

### **Perbedaan Pola Framing antar Media**

Perbedaan pola *framing* antar media mencerminkan bagaimana setiap media memiliki kecenderungan ideologis yang memengaruhi cara mereka menyajikan berita, terutama dalam isu-isu sensitif seperti aksi mahasiswa menolak RUU TNI. Media yang lebih pro-pemerintah cenderung menggunakan framing yang menekankan pentingnya stabilitas dan ketertiban, serta mengarahkan fokus pada potensi gangguan yang ditimbulkan oleh aksi

---

<sup>1</sup> Lestari, P. (2015). *Peran Media dalam Pembentukan Opini Publik di Indonesia*.

<sup>2</sup> Daryanto, J. (2013). *Komunikasi Politik dan Media*.

mahasiswa. Dalam pemberitaan mereka, istilah seperti "ancaman terhadap keamanan" atau "kerusuhan" lebih sering digunakan untuk menggambarkan aksi tersebut, yang mengarahkan audiens untuk melihat gerakan mahasiswa sebagai sebuah masalah yang harus segera diatasi demi kepentingan publik. Selain itu, media ini juga mengutip lebih banyak pernyataan dari aparat keamanan atau pejabat pemerintah yang menilai aksi mahasiswa sebagai sebuah kekacauan yang perlu dihentikan.

Media yang lebih kritis terhadap pemerintah atau yang memiliki orientasi independen lebih sering membingkai aksi mahasiswa sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan sebuah ekspresi sah dari hak demokrasi. Dalam *framing* ini, media memberi perhatian lebih besar pada isu-isu terkait peran militer dalam kehidupan sipil dan dampaknya terhadap kebebasan sipil. Media semacam ini cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat mereka, dengan menekankan pentingnya keberanian mahasiswa untuk mengingatkan negara tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan. *Framing* media semacam ini lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik, yang mengarah pada interpretasi bahwa aksi mahasiswa merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, perbedaan pola *framing* ini menggambarkan bagaimana media dapat membentuk persepsi publik berdasarkan afiliasi politik dan tujuan redaksional mereka.<sup>3</sup>

### **Implikasi Framing terhadap Persepsi Publik dan Isu Demokrasi**

*Framing* yang dilakukan media terhadap aksi mahasiswa memiliki dampak yang signifikan terhadap cara publik memandang gerakan tersebut dan dampaknya terhadap demokrasi. Media yang membingkai aksi mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial berpotensi memperburuk persepsi negatif terhadap gerakan tersebut di kalangan publik, terutama mereka yang tidak terlibat langsung dalam aksi. *Framing* seperti ini cenderung menurunkan legitimasi mahasiswa sebagai aktor politik yang sah, dan mengalihkan perhatian publik dari substansi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, *framing* yang lebih substantif, yang menyoroti nilai-nilai demokrasi dan pentingnya kontrol sosial terhadap kekuasaan, berpotensi membangkitkan kesadaran publik akan urgensi menjaga keseimbangan antara kekuasaan sipil dan militer, serta menjaga hak-hak sipil dalam sebuah negara demokratis.<sup>4</sup>

Dampak *framing* media ini juga terlihat pada kualitas demokrasi itu sendiri. Apabila media gagal membingkai isu ini dengan kritis dan mendalam, publik akan kehilangan kesempatan untuk memahami secara utuh berbagai dimensi yang terlibat dalam penolakan RUU TNI, termasuk potensi bahaya bagi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam konteks ini, *framing* media menjadi instrumen yang sangat kuat dalam membentuk diskursus publik dan mengarahkan pembicaraan nasional.<sup>5</sup> Oleh karena itu, media tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi tersebut tidak hanya sekadar menggambarkan peristiwa, tetapi juga memberikan ruang untuk diskusi yang lebih luas mengenai implikasi politik dan sosial dari suatu isu.

### **Tantangan Objektivitas Media dalam Isu Sensitif**

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh media dalam meliput isu-isu sensitif seperti aksi mahasiswa menolak RUU TNI adalah bagaimana menjaga objektivitas dalam pemberitaan. Media sering kali terjebak dalam dilema antara menjaga independensi editorial

---

<sup>3</sup> Daryanto, J. (2013). *Komunikasi Politik dan Media*.

<sup>4</sup> Hidayat, F. (2018). *Pengaruh Framing Media terhadap Perubahan Sosial di Indonesia*.

<sup>5</sup> Nugroho, R. (2016). *Media dan Demokrasi: Peran Media dalam Demokrasi Indonesia*.

dan menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau ekonomi. Media dengan kepemilikan yang terkait erat dengan pihak pemerintah, misalnya, mungkin cenderung untuk menurunkan intensitas kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengingat adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Di sisi lain, media yang lebih independen sering kali harus berhadapan dengan tantangan dalam mendapatkan akses informasi atau narasumber yang objektif, terutama ketika isu yang diangkat bersinggungan dengan kepentingan negara.

Kasus penolakan RUU TNI, media yang berusaha tetap objektif sering kali menemukan diri mereka terjebak dalam pemberitaan yang cenderung netral, namun tidak mendalami substansi kritik terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, pemberitaan semacam ini tidak mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh RUU TNI terhadap demokrasi. Tantangan ini mempertegas pentingnya media independen yang dapat menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam peliputan, serta memfasilitasi ruang publik yang sehat untuk diskusi dan debat yang konstruktif. Selain itu, peningkatan literasi media di kalangan masyarakat juga menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pemberitaan yang bias dan mendorong audiens untuk dapat menilai berbagai sudut pandang yang ada dalam pemberitaan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap aksi mahasiswa yang menolak RUU TNI melalui teknik framing. Media yang mendukung pemerintah cenderung menggambarkan aksi mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas, sementara media yang lebih kritis menyoroti kekhawatiran akan dampak perluasan peran militer terhadap demokrasi. Representasi mahasiswa dalam pemberitaan juga dipengaruhi oleh ideologi dan afiliasi media, di mana media pro-pemerintah seringkali menurunkan legitimasi gerakan mahasiswa, sedangkan media independen memberi ruang lebih besar untuk suara mereka. Framing media ini berdampak signifikan terhadap bagaimana publik memaknai aksi tersebut dan isu yang diangkat, serta menyoroti tantangan objektivitas media dalam meliput isu sensitif. Penelitian ini menegaskan pentingnya media independen dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendorong diskursus publik yang lebih sehat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Daryanto, J. (2013). *Komunikasi politik dan media*. Bandung: Alfabeta.
- Eriyanto. (2012). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hidayat, F. (2018). *Pengaruh framing media terhadap perubahan sosial di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Media.
- Lestari, P. (2015). *Peran media dalam pembentukan opini publik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, R. (2016). *Media dan demokrasi: Peran media dalam demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Sobur, A. (2004). *Teori komunikasi massa: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, S. (2020). *Media dan gerakan sosial: Studi kasus gerakan mahasiswa di Indonesia*.